

BAB IV

PROSES PENERIMAAN SLOVAKIA

Salah satu syarat yang diajukan oleh Dewan Eropa bagi negara-negara yang ingin berintegrasi ke dalam Uni Eropa adalah reformasi di bidang politik. Uni Eropa mengharuskan setiap anggotanya menganut sistem politik yang responsif terhadap nilai-nilai demokrasi.

Demokrasi merupakan konsep yang memiliki cakupan luas dan bisa diterjemahkan menurut versi masing-masing orang. Beberapa versi demokrasi antara lain adalah demokrasi Marxist, demokrasi Ikhwanis, demokrasi Terpimpin, dan lain-lain. Dari sejumlah versi tersebut, versi mana yang benar-benar sangat bergantung dari bagaimana mendefinisikan mengenai demokrasi itu sendiri. Namun demokrasi dalam pengertian modern, demokrasi yang diterapkan oleh negara-negara maju dan menjadi ukuran lembaga-lembaga internasional adalah konsep Demokrasi Liberal.⁴⁹

Secara sederhana, demokrasi liberal bisa didefinisikan sebagai sebuah sistem politik yang dibangun berdasarkan perwakilan, aturan hukum, dan konstitusi, serta perlindungan terhadap kebebasan individu dan hak-hak minoritas. Demokrasi liberal tidak hanya

⁴⁹ Lutfi Assyaukanie, "*Islam Liberal Untuk Demokrasi Liberal*", <http://www.assyaukanie.com/articles/islam-liberal-untuk-demokrasi-liberal>

menekankan pada pemilu dan jumlah mayoritas, tapi juga pada kebebasan individu dan hak-hak minoritas. Kaum ideologis (misalnya dari golongan Komunis dan Agama), seringkali menganggap bahwa demokrasi liberal hanyalah pemilu dan mayoritas atau disebut sebagai “demokrasi elektoral” atau “demokrasi prosedural”. Demokrasi seperti ini hanya menekankan mekanisme pertarungan politik saja, dan kurang peduli pada inti yang menjadi target demokrasi, yakni kebebasan individu dan hak-hak sipil.⁵⁰

Agar dapat membangun demokrasi, dibutuhkan loyalitas askriptif dan pengawalan secara simultan terhadap nilai-nilai demokrasi itu sendiri hingga sampai pada tahap akhir demokrasi yaitu internalisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meski demikian, pelembagaan politik representasi dan partisipasi tidaklah cukup dan bukan jaminan tumbuhnya nilai-nilai demokrasi. Hal tersebut hanya saran menuju demokrasi. Adakalanya demokrasi perlu diukur dengan ukuran-ukuran pragmatis karena seperti itulah demokrasi seharusnya bekerja.⁵¹

Dengan demikian stabilitas institusi-institusi politik negara dalam menjamin pertumbuhan demokrasi, penegakan hukum, perlindungan hak-hak asasi manusia dan penghargaan terhadap kelompok minoritas merupakan kriteria yang wajib dipenuhi oleh Slovakia agar bisa menjadi anggota Uni Eropa.

⁵⁰ Lutfi Assyaukanie, “Islam Liberal Untuk Demokrasi Liberal”, <http://www.assyaukanie.com/articles/islam-liberal-untuk-demokrasi-liberal>

⁵¹ Masdar Hilmy, “Jalan Terjal Menuju Demokrasi”, <http://pasca.sunan-ampel.ac.id/?p=147>

I. Proses Demokratisasi

Pasca kemerdekaannya, Slovakia berupaya merombak sistem politik dan institusi-institusi politik untuk mengadopsi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Dewan Eropa. Perubahan menuju sistem politik yang lebih demokratis bukanlah hal yang mudah bagi Slovakia. Ketegangan dalam tubuh pemerintah, skandal korupsi, dan lemahnya kemampuan badan administrative dan lembaga-lembaga lainnya merupakan hambatan yang dihadapi Slovakia dalam proses demokratisasi. Berbagai kebijakan dan perbaikan-perbaikan di bidang politik yang telah dilakukan Slovakia dianggap cukup berhasil menciptakan demokrasi di negeri ini sehingga Dewan Uni Eropa memutuskan memasukkan Slovakia ke dalam keanggotaan Uni Eropa.

A. Pembentukan Institusi Politik Yang Demokratis.

Sejak kemerdekaannya, Slovakia mengalami serangkaian perubahan institusional dan berpotensi mengancam pelaksanaan pemilu yang demokratis. Hal ini ditandai dengan hubungan yang tidak harmonis antara masyarakat dengan institusi politik dan di kalangan elit politik dalam pemerintahan itu sendiri.

Pada akhir tahun 1996, parlemen menerima surat pengunduran diri dari sejumlah wakil anggota pemerintahan koalisi di parlemen, selain itu terdapat juga sejumlah anggota yang menolak untuk diberhentikan.⁵² Sekalipun Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa

⁵² "Politik Slovakia", http://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_slovakia

telah terjadi pelanggaran dan menganggap pemecatan tersebut tidak sah, namun wakil koalisi partai tidak bersedia mematuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Peristiwa serupa juga terjadi pada tahun 1997, ketika parlemen menolak menerima perubahan alternatif mengenai jumlah kursi partai koalisi di parlemen.⁵³ Mahkamah Konstitusi kembali menyatakan bahwa parlemen telah melanggar hak-hak Mahkamah Konstitusi dengan menolak keputusan tersebut. Selama periode ini, pemerintahan koalisi menolak membuat laporan pertanggungjawaban kepada anggota parlemen lain kepada badan hukum tertinggi di negara tersebut.⁵⁴

Tahun 1997 pemerintahan koalisi kembali menolak pertanggungjawaban mengenai referendum pemilihan presiden secara langsung yang diajukan oleh partai oposisi. Taktik yang digunakan oleh pemerintahan koalisi usulan referendum dari partai oposisi akan mempersulit mekanisme pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh parlemen.

Setelah terbukti melakukan intervensi dalam proses pemilihan, pemerintah koalisi bertindak lebih jauh untuk memodifikasi undang-undang tentang pemilihan yang akan menciptakan masalah-masalah administratif bagi partai oposisi dan menegaskan peran media massa dalam mengontrol pemerintah. Keberhasilan pemerintahan koalisi dalam pemilihan parlemen pada September 1998 akan meningkatkan kemungkinan pemerintah

⁵³ "Politik Slovakia", http://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_slovakia

⁵⁴ "The Slow Strangulation of Democracy in Slovakia", <http://antiwar.com/orig/nagle3.html>

koalisi memperluas kekuasaannya sampai habis masa jabatannya. Jika parlemen dapat disatukan maka perpecahan antara pemerintah koalisi dengan institusi politik lainnya dapat direduksi. Hal ini juga bisa mengurangi tuduhan bahwa pemerintahan koalisi memimpin secara tidak konstitusional.

Pemerintahan Vladimir Meciar merupakan rezim semi otoriter yang secara serius telah melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hukum sampai akhirnya tersingkir oleh pemilihan parlemen pada tahun 1998 yang dimenangkan pemimpin koalisi Mikulas Dzurinda.⁵⁵ Pemerintahan Dzurinda membuat sejumlah perubahan politik dan ekonomi yang memungkinkan Slovakia bergabung dengan organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan (*Organization for Economic Cooperation and Development / OECD*), memenuhi semua persyaratan menjadi anggota Uni Eropa, dan menjadikan Slovakia sebagai kandidat kuat untuk bergabung dalam keanggotaan NATO. Akan tetapi pada waktu itu partai pemerintah mengalami penurunan dukungan dari masyarakat, dan beberapa partai baru justru memperoleh banyak dukungan dalam beberapa jajak pendapat.

Pada bulan Desember 2002 diselenggarakan pemilihan anggota parlemen. Perdana Menteri Dzurinda kembali mendapat mandat menjadi Perdana Menteri untuk periode kedua. Pemerintahan koalisi yang dibentuk oleh Dzurinda memasukkan partai kelompok minoritas, yaitu *Hungarian Coalition Party (SMK)*, selain itu juga terdapat *Christian Democrat Party (KDH)* dan *Alliance of New Citizen (ANO)*. Partai Movement For A

⁵⁵ "Politik Slovakia", http://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_slovakia

Democratic Slovakia pimpinan Vladimir Meciar yang memperoleh dukungan 27% dalam pemilihan 1998, namun pada pemilihan tahun 2002 hanya berhasil memperoleh dukungan suara 19,5% dan menjadi partai oposisi.

Pemerintah memberi dukungan sepenuhnya terhadap upaya integrasi ke dalam NATO dan Uni Eropa, dan berjanji akan melanjutkan demokratisasi dan reformasi di bidang ekonomi. Agenda utama dari koalisi baru yang terbentuk adalah menjadi anggota NATO dan Uni Eropa, memerangi korupsi, mengundang investor asing, dan reformasi di sektor pelayanan publik.

Pada bulan Desember 1998 pemerintahan Slovakia mencabut amnesti yang diberikan kepada Meciar atas kasus penculikan Kovac pada musim panas tahun 1998. Pencabutan amnesty ini membuka jalan bagi pembuatan undang-undang mengenai imunitas parlemen yang sangat penting bagi perkembangan demokrasi di Slovakia. Pemberian amnesti selalu menimbulkan kritik di kalangan masyarakat berkaitan dengan penegakan hukum.

Berakhirnya pemerintahan otoriter rezim Meciar pada tahun 1998 telah membuka peluang bagi lahirnya norma-norma demokrasi dan di kemudian hari mendekatkan hubungan Slovakia dengan negara-negara Barat. Slovakia dengan cepat melakukan konsolidasi intitusi-institusi demokrasi sebagai berikut :

1. Parlemen

Parlemen Slovakia disebut sebagai *The Slovak National Council* (SNR) dan memproklamkan kemerdekaan Slovakia pada bulan Juni 1992. Konstitusi Slovakia diadopsi pada bulan September 1992, dan perwakilan Federasi Cekoslovakia membuat 35 hukum yang diperlukan untuk mengakhiri federasi tersebut. Konstitusi Slovakia memuat ketentuan mengenai sistem multi partai, sistem ekonomi pasar, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Kekuatan legislatif berada di tangan parlemen tunggal yang berganti nama menjadi *The National Council of the Slovak Republic* (SNSR) setelah kemerdekaan.

Parlemen memiliki anggota 150 orang yang dipilih dengan mekanisme pemilihan perwakilan proporsional untuk masa jabatan empat tahun. Hanya partai politik yang berhasil memperoleh sedikitnya 5% dari total suara (7% suara untuk koalisi 2 atau 3 partai dan 10% untuk koalisi 4 partai atau lebih) yang bisa mendapatkan kursi di parlemen.

Parlemen memegang kekuasaan legislatif dan berhak member masukan kepada pemerintah. Pemerintah bisa membuat peraturan yang sejalan dengan yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Presiden dapat mengajukan referendum dengan syarat mendapat dukungan dari sekurang-kurangnya 300.000 penduduk. Referendum ditujukan untuk hokum perundang-undangan atau untuk memutuskan

bahwa apakah Slovakia meneruskan atau menarik diri dari sebuah perserikatan dengan negara lain. Referendum juga bisa digunakan untuk kepentingan lain seperti HAM, sistem perpajakan, dan anggaran nasional.

Parlemen memiliki hak mengontrol berbagai hal yang berkaitan dengan konstitusi, anggaran belanja negara, hubungan luar negeri, pertahanan, serta kebijakan ekonomi dan sosial. Parlemen terdiri dari 150 orang wakil rakyat yang dipilih untuk periode empat tahun. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri yang diangkat oleh Presiden, namun bertanggungjawab kepada parlemen.

Pemilihan di Slovakia juga mengalami perbaikan dan berlangsung secara bebas dan adil. Pemilihan Parlemen pada bulan September 1994 membawa Slovakia kedalam pemerintahan koalisi yang dipimpin oleh partai Movement for a Democratic Slovakia, yang kehilangan dukungan mayoritas pada bulan Maret pada tahun tersebut akibat perpecahan internal.

Hak-hak kelompok oposisi belum mendapat penghargaan penuh, terutama yang berkaitan dengan keanggotaan di Parlemen. Dari tahun 1994 sampai dengan Januari 1997 tidak ada ketentuan yang mengatur oposisi untuk mendapatkan jumlah kursi yang proporsional di parlemen guna mengawasi korupsi dan badan penyelidikan angkatan bersenjata.⁵⁶ Komite penyelidikan ini tidak terbentuk karena pemerintah

⁵⁶ Imogen Bell, *Regional Surveys Of The World, Central and South-Eastern Europe 2004 ; IDEA's Slovakia programme ended in 2003*, The Gresham Press, London, United Kingdom, 2003, Hal. 599.

menolak anggota oposisi duduk di dalamnya. Kelompok oposisi tidak menjadi ketua komite tetap di parlemen.

2. Presiden

Berdasarkan ketentuan dalam konstitusi, Presiden dipilih oleh 3/5 mayoritas anggota parlemen untuk masa jabatan lima tahun dan hanya boleh satu kali dipilih kembali. Presiden memiliki hak prerogatif sebagai kepala negara. Presiden dapat dipecat oleh parlemen dengan suara 3/4 dari total anggota parlemen jika Presiden bertindak bertentangan dengan kedaulatan dan kesatuan teritorial, atau melanggar konstitusi, dan sistem demokrasi⁵⁷. Presiden bisa menolak semua rancangan undang-undang yang dibuat oleh Parlemen, namun Parlemen dapat menggagalkan veto Presiden dengan suara mayoritas dari anggota Parlemen.

Presiden pertama Slovakia adalah Michal Kovac yang terpilih pada Februari 1993. Ditengah upaya Perdana Menteri Meciar yang memaksanya agar berhenti, Kovac akhirnya memegang jabatan tersebut sampai tahun 1998. Ancaman bagi terjadinya krisis konstitusional muncul ketika ada kekhawatiran bahwa kekuasaan kepresidenan akan jatuh ke tangan Perdana Menteri Meciar dan mendorong kelompok oposisi untuk mengeluarkan referendum pemilihan Presiden secara langsung. Setelah menang pada pemilihan parlemen, pemerintahan Slovakia berada

⁵⁷ <http://www.economist.com/countries/slovakia>

di bawah kekuasaan Perdana Menteri Dzurinda, Dzurinda juga langsung melakukan reformasi dengan mengamandemen konstitusi dan memberlakukan pemilihan presiden secara langsung. Schuster terpilih sebagai presiden pada bulan Mei 1999 setelah melewati dua putaran pemilihan.

Secara administratif wilayah Slovakia dibagi ke dalam 8 wilayah dan 79 distrik yang dipimpin oleh wakil pemerintah. Peraturan undang-undang yang dikeluarkan pada bulan Juli 1996 memperluas kekuasaan pemerintahan daerah. Administrasi di Slovakia tidak memiliki kantor pemerintah yang secara jelas menaungi hak-hak dan kewajiban pegawai sipil. Hal ini mempersulit pemerintah dalam menangani permasalahan korupsi yang dialami Slovakia. Angkatan bersenjata dan kepolisian berada di bawah kekuasaan sipil dan bertanggungjawab secara langsung kepada Perdana Menteri. Namun dalam prakteknya, mereka lebih tunduk kepada Parlemen.

Kelemahan utama yang ditemui dalam kekuatan eksekutif di Slovakia adalah pemerintahan yang berkuasa saat itu tidak secara penuh menghormati tanggungjawab dan peran lembaga-lembaga pemerintah dan justru mengambil sikap konfrontasi yang secara tradisional dapat diterima dalam struktur demokrasi. Ketegangan antara Presiden dengan pemerintah merupakan contoh dari situasi ini. Pada tahun 1995, mayoritas partai menyusun rencana pemecatan Presiden walaupun

pra syarat yang diperlukan untuk melakukan hal tersebut tidak ada. Proses ini tidak berhasil karena pemerintah tidak mendapat dukungan dari 2/3 anggota parlemen. Pada bulan Oktober 1995, penduduk sipil diminta menandatangani petisi dari menteri kebudayaan yang mendukung pemecatan presiden. Bagi mereka yang tidak mau menandatangani akan diberi sanksi dan ancaman terjadinya konflik dalam pemerintah. Pertengahan Oktober 1995 Uni Eropa menunjukkan kepeduliannya terhadap ketegangan politik di Slovakia, khususnya yang berkaitan dengan upaya pemecatan presiden yang tidak sejalan dengan konstitusi dan bertentangan dengan praktek demokrasi di negara-negara Uni Eropa. Dalam resolusi yang dikeluarkan pada bulan November 1995, parlemen Eropa mengambil beberapa langkah antara lain dengan menyelenggarakan referendum untuk mengadakan pemilihan presiden secara langsung dengan hak-hak universal. Pemerintah diikuti oleh Mahkamah Agung kemudian menyatakan bahwa referendum tersebut sudah sesuai dengan konstitusi.

3. Pengadilan

Sistem pengadilan merupakan gabungan dari tiga tingkatan yaitu 55 pengadilan negeri, 8 pengadilan wilayah, dan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan otoritas pengadilan tertinggi dalam negeri yang bertugas menangani pengadilan kasasi. Pengadilan konstitusional dibentuk sebagai lembaga yang

memiliki otoritas independen, yang didirikan untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan konstitusi.

Pembentukan lembaga pengadilan yang independen di Slovakia mempunyai beberapa hambatan. Hakim dipilih oleh parlemen berdasarkan usul dari pemerintah. Hakim hanya dapat dipecat oleh parlemen setelah menerima laporan pelanggaran disiplin dan hanya untuk alasan-alasan yang serius. Hakim menikmati hak imunitas, seperti halnya jaksa penuntut, dimana hakim hanya bisa dipindahkan oleh pengadilan konstitusi hakim, dan bukan oleh anggota partai politik.

Mahkamah Agung didirikan tahun 1993, terdiri dari 10 anggota yang diangkat untuk periode 7 tahun oleh presiden dari daftar 20 nama yang diajukan oleh parlemen. Mahkamah Agung bertugas mengawasi penyesuaian hukum dan peraturan-peraturan dengan konstitusi dan perjanjian internasional. Mahkamah Agung menyelesaikan konflik yang mungkin terjadi antara berbagai macam kekuatan-kekuatan politik, pemilihan hakim, referendum dan sebagainya. Mahkamah Agung memainkan peran yang sangat aktif dalam menjaga keseimbangan antara berbagai elit politik di Slovakia.

Sekalipun reformasi dan reorganisasi lembaga pengadilan di Slovakia mendapat kritikan dan dinilai berjalan lambat oleh negara-negara Uni Eropa lainnya, namun pemerintah berupaya mengadakan perbaikan dengan

mengamandemen artikel 145 konstitusi Slovakia. Hal ini juga memberikan keuntungan bagi lembaga pengadilan tertinggi di Slovakia, yaitu Mahkamah Agung yang terdiri dari 10 hakim yang kemudian akan diatur secara lebih profesional dibandingkan pada periode pemerintahan Meciar. Selain itu perubahan lain yang juga dilakukan oleh pemerintah Slovakia di bidang pengadilan adalah upaya untuk menambah kuota perwakilan dari suku daerah di dewan kota.

Pada tahun 1997, situasi politik di Slovakia belum menunjukkan pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi secara luas, hak-hak oposisi masih dibatasi, ketegangan antara presiden dan pemerintah mengancam stabilitas politik. Misalnya penolakan pemerintah koalisi terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi, dan referendum bulan Mei 1997 merupakan ancaman nyata bagi stabilitas institusi demokrasi.

Pemerintah Slovakia berupaya mereformasi lembaga pengadilan. Undang-undang No.90 tahun 2001 adalah hasil dari amandemen konstitusi dasar Slovakia. Amandemen yang mulai berlaku efektif mulai 1 Januari 2002 ini mencakup perubahan sejumlah aspek krusial dalam peraturan hukum Slovakia termasuk mengenai lembaga pengadilan yaitu yang berkaitan dengan pemisahan kekuasaan

pengadilan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif, perluasan wewenang kehakiman, lembaga pengadilan yang independen dan pembentukan mahkamah konstitusi.⁵⁸

Dewan pengadilan republik Slovakia dibentuk dengan kekuasaan mengajukan calon untuk posisi hakim, ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung. Masa percobaan bagi para hakim telah dihapuskan. Amandemen konstitusi juga mengenai kompetensi dan aturan procedural Mahkamah Konstitusi, termasuk di dalamnya perluasan kedudukan dan kekuasaan hokum Mahkamah Konstitusi. Perluasan ini tidak hanya berkaitan dengan hanya perluasan kemampuan kompetensi Mahkamah Konstitusi, namun juga perlindungan Mahkamah Konstitusi terhadap perlindungan hak-hak asasi manusia.⁵⁹ Hasil yang diperoleh dari berfungsinya lembaga pengadilan yang melindungi hak-hak asasi manusia dan kebebasan masyarakat mengurangi kritikan dari Pengadilan Eropa mengenai perlindungan hak asasi manusia di Slovakia.⁶⁰

Pada tahun 2002 Slovakia juga telah memperbaiki prosedur pemilihan anggota kehakiman. Dewan Kehakiman yang berwenang mengusulkan nama-nama calon hakim dan prioritas untuk menyetujui sudah dialihkan dari parlemen ke presiden. Sistem evaluasi periodik terhadap kinerja anggota pengadilan telah mulai diperkenalkan sejak tahun 2000, akan tetapi baru mulai diujicoba pada tahun 2002,

⁵⁸ Judicial Reform Index for Slovakia. 2002. <http://www.abanet.org/ceeli/countries/slovakia/legalinfo.html>

⁵⁹ *ibid*

⁶⁰ *ibid*

hal ini dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme dan mencegah penyalahgunaan yang mungkin terjadi sebagai akibat dari independen lembaga pengadilan.⁶¹

Menurut peraturan tersebut, evaluasi dilakukan setiap lima tahun sekali, atau setiap kali penerimaan anggota, atau kapan pun hakim merasa perlu melakukannya. Ketua Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk melaksanakan evaluasi tersebut. Reformasi di bidang pengadilan ini mengacu pada sistem lembaga pengadilan di Eropa. Sekalipun proses reformasi ini belum sepenuhnya selesai, namun beberapa kondisi telah menunjukkan perubahan ke arah pembentukan lembaga pengadilan yang independen, menjamin hak-hak asasi manusia, terbebas dari pengaruh lembaga eksekutif dan legislatif, serta lembaga kehakiman yang profesional dan bersih. Dengan kata lain pemerintah Slovakia telah berhasil memulai reformasi lembaga pengadilan yang lebih demokratis dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

⁶¹ Judicial Capacity in Slovakia. http://www.soros.org/resources/articles_publications/publications/judcap_20030101

B. Partai Politik di Slovakia

Spektrum politik di Slovakia diwarnai oleh beragam partai politik termasuk di dalamnya terdapat Partai Komunis Slovakia (*Komunistická Strana Slovenska - KSS*) dan Partai Nasionalis Slovakia (*Slovenská Národná Strana - SNS*).⁶² Kemudian partai-partai baru bermunculan dan partai-partai lama ada yang masih bertahan atau menghilang sejalan dengan waktu. Partai besar adalah anggota European Political Parties. Beberapa partai memiliki basis dukungan wilayah yang sangat kuat seperti halnya Partai Koalisi Hongaria (*Strana Madárskej Koalicie – SMK*) yang mendapat dukungan dari etnis minoritas Hongaria di yang tinggal di selatan Slovakia.

Berdasarkan sistem multi partai maka yang memerintah sejak 31 Desember 1994 adalah pemerintah koalisi yang terdiri dari Partai Gerakan Demokratik Slovakia (*Slovak Democratic Movement*), Partai Nasional Slovakia (*Slovenská Národná Strana – SNS*), Partai Demokratik Kiri (*Party of Left Democratic*), Partai Koalisi Hongaria (*Strana Madárskej Koalicie – SMK*), Partai Gerakan Kristen Demokratik (*Christian Democratic Movement*), Partai Persatuan Buruh Demokratik Slovakia (*Democratic Union of the Workers of Slovakia*). Dalam pemilihan umum tahun 1998, sekalipun memperoleh dukungan mayoritas dan merupakan partai terbesar dan paling populer di Slovakia, *Slovak Democratic Movement* gagal meletakkan pemimpinnya sebagai perdana menteri karena

⁶² http://en.wikipedia.org/wiki/Communist_Party_of_Slovakia

tidak ada partai lain yang bergabung untuk membentuk koalisi pemerintahan. Dikarenakan partai-partai lain yang lebih kecil bergabung bersama-sama dan membentuk koalisi partai.

Sekalipun Slovakia sudah mengadopsi sistem multipartai, namun jumlah partai masih relatif sedikit. Partai-partai kecil mulai aktif dalam perpolitikan di Slovakia, namun tidak memegang peranan penting di dalam perpolitikan Slovakia. Partai-partai kecil ini biasanya tidak terlalu populer di kalangan masyarakat dan tidak mampu mengantisipasi pemilihan berikutnya sehingga sebagian dari mereka tidak bertahan dalam sistem politik.

Perkembangan pertumbuhan partai-partai politik mulai terlihat ketika parlemen Slovakia berhasil menciptakan kelompok-kelompok kecil dari wakil rakyat di parlemen yang memenuhi jumlah minimal anggota membentuk partai politik.⁶³Selain itu untuk mendukung pertumbuhan partai politik, pemerintah member kemudahan kepada masyarakat untuk mendirikan partai politik dan mengurangi hambatan-hambatan administratif untuk pendirian sebuah partai politik. Pemerintah juga menjamin kebebasan setiap warga negara untuk berorganisasi dan meningkatkan partisipasi politiknya. Pemerintah berupaya menciptakan iklim kondusif bagi pertumbuhan partai dengan memberikan perlindungan keberadaan partai dan keragaman ideologi⁶⁴. Kebijakan ini berpengaruh terhadap peningkatan jumlah partai politik di Slovakia. Adapun perubahan tersebut adalah penambahan jumlah partai, yang semula berjumlah 12 partai sampai tahun

⁶³ http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_political_parties_in_Slovakia

⁶⁴ <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3430.htm>

1994, menjadi 18 partai dari tahun 1997-2006 dan keaktifan partai-partai tersebut. Mayoritas partai sebelum tahun 1994 tidak berperan aktif dalam kegiatan politik atau dapat dikatakan hanya sekedar nama, bahkan banyak rakyat Slovakia yang tidak mengetahui keberadaan partai-partai tersebut. Namun setelah tahun 1997, partai-partai di Slovakia sudah mulai berperan dalam kegiatan politik secara aktif seperti pemilihan umum tahun 1998. Jumlah partai-partai politik terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini menandai keberhasilan pemerintah menciptakan sistem politik yang kondusif bagi mekanisme multipartai.

C. Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kelompok Minoritas

Kelompok minoritas di Slovakia berjumlah 23% yang terdiri dari etnis Hongaria (13%), dan Gypsi (10%). Pada tahun 1995, kelompok minoritas Hongaria hanya mendapatkan 17 kursi dengan tiga partai di parlemen. Pemerintah belum sepenuhnya memperhatikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kelompok minoritas seperti kondisi social ekonomi, keterbelakangan, dan partisipasi di bidang politik⁶⁵. Pada tahun 1995 terjadi ketegangan antara pemerintah dengan kelompok minoritas. Permasalahan berkaitan dengan penerapan undang-undang bahasa nasional yang mencabut ketentuan awal mengenai diperbolehkannya penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa resmi pejabat di lingkungan pemerintahan yang berjumlah 20% dari kelompok minoritas. Selain masalah bahasa, persoalan diskriminasi dan sentiment anti-Hongaria juga dihadapi oleh kelompok

⁶⁵ <http://www.la.wayne.edu/polisci/kdk/papers/mpsa1998.htm>

etnis Hongaria. Pernyataan sikap anti-Hongaria terdapat di sejumlah kantor, gedung-gedung pertunjukkan, sekolah-sekolah, dan sebagainya. Peluang bagi kaum Hongaria untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi tidak lebih dari 2,7%⁶⁶. Dalam rangka memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh Uni Eropa, pemerintah Slovakia dimulai dari rezim Dzurinda telah mengadopsi hukum-hukum baru yang bisa melindungi kelompok minoritas. Pemerintah mengamandemen undang-undang pasal 34 ayat 2 yang menyatakan bahwa kelompok minoritas bisa menggunakan bahasanya dalam berkomunikasi di tingkat pejabat daerah. Pada tahun 1999, pemerintah Slovakia membentuk sebuah komisi untuk mengawasi perlindungan terhadap kaum minoritas yang mengadopsi piagam Eropa mengenai bahasa minoritas.

Selain itu sampai tahun 2002 pemerintah Slovakia telah meratifikasi berbagai norma-norma dan hukum internasional untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kelompok minoritas. Beragam konvensi internasional juga diimplementasikan, bahkan semua konvensi Eropa mengenai hak asasi manusia dan pasal-pasal tambahannya. Kebijakan pemerintah Slovakia mengadopsi protokol dalam konvensi Eropa ini sesuai dengan persyaratan yang diajukan Uni Eropa bagi negara-negara yang berkeinginan menjadi anggota, yakni dengan meratifikasi konvensi tersebut.

Slovakia telah menjadi anggota dewan Eropa sejak tahun 1993 dan mengadopsi European Convention on Human Rights sejak bulan Maret 1992 ketika masih terintegrasi

⁶⁶ <http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2006/78838.htm>

sebagai Chekoslovakia. Konvensi ini memberikan jaminan kepada setiap individu untuk mengajukan kasusnya ke Mahkamah Eropa jika mereka merasa bahwa hak-hak asasi mereka dilanggar.⁶⁷

Selain meratifikasi konvensi internasional mengenai perlindungan hak asasi manusia dan kelompok minoritas, Slovakia juga meratifikasi konvensi melawan kekerasan yang dilakukan terhadap kelompok minoritas, Slovakia juga mengadopsi konvensi utama PBB mengenai perlindungan HAM.

Dalam konstitusi Slovakia dijelaskan bahwa konvensi internasional tentang perlindungan HAM dan kelompok minoritas memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan konvensi nasional jika dianggap lebih baik.

Pemerintah Slovakia memberikan perhatian yang besar kepada system pengadilan untuk memberi kemudahan bagi setiap penduduk untuk memperoleh bantuan hukum dalam setiap kasus yang dihadapi. Hukum mati telah dihapuskan sejak tahun 1990 dan dilarang diberlakukan dengan segala keadaan. Penduduk juga mempunyai hak membela diri terhadap penangkapan sewenang-wenang. Tidak satu orang pun bisa ditahan tanpa adanya surat perintah yang dikeluarkan oleh jaksa penuntut umum. Selama proses penyidikan berlangsung, tertuduh berhak memperoleh bantuan pengacara, dan dalam waktu 24 jam hakim harus memutuskan apakah tertuduh dilepaskan atau terus diperiksa.

⁶⁷ Agenda 2000 - Commission Opinion on Slovakia's Application for Membership of the European Union
http://www.ena.lu/slovak_republic_application_accession_european_union_27_june_1995-02-17933

Semua penduduk yang telah berusia lebih dari 18 tahun memiliki hak untuk ikut dalam pemilihan umum. Kebebasan berorganisasi juga dijamin oleh pemerintah, sama halnya dengan kebebasan melakukan demonstrasi dan berekspresi. Pemerintah mengamandemen undang-undang mengenai kebebasan berekspresi dan mendapatkan informasi yang terdapat dalam Konstitusi Slovakia Bagian III Pasal 26 pada tahun 2002⁶⁸. Pemerintah memastikan bahwa undang-undang hukum pidana tidak akan digunakan untuk menghalangi kebebasan masyarakat dalam berekspresi. Pemerintah juga menerapkan undang-undang tahun 1990 mengenai hak membentuk organisasi dan asosiasi (Law of the Right of Association). Undang-undang ini memberikan kebebasan bagi rakyat untuk membentuk organisasi, pergerakan, perkumpulan, perserikatan dan termasuk bergabung di dalamnya. Hasilnya adalah dengan meningkatnya jumlah asosiasi sebanyak 12.000 NGOs di Slovakia.

Selain itu pemerintah juga menjamin kebebasan rakyat untuk mendapatkan informasi dan mendorong kemajuan lembaga-lembaga penyiaran dan media massa. Hal ini mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan sektor audio visual milik swasta mengalami peningkatan pada tahun 1997 yaitu, 1 jaringan televisi swasta nasional, 5 jaringan televisi swasta lokal, dan 20 stasiun radio swasta. Hal ini secara substantif meningkatkan kebebasan masyarakat Slovakia. Pertumbuhan ini juga didukung oleh pertumbuhan stasiun televisi dan radio asing sebanyak 49 saluran. Selain itu, terdapat

⁶⁸ http://www.vop.gov.sk/en/legal_basis/constitution.html

peningkatan signifikan dalam hal ragam atau jenis surat kabar yang beredar di Slovakia yaitu mencapai 911 koran harian nasional pada tahun yang sama.⁶⁹ Hak milik properti dihargai dan ditempatkan dalam kerangka kepentingan publik dengan sistem kompensasi yang adil.

Pemerintah menerapkan sistem yang efisien untuk memberi ganti rugi benda milik rakyat yang dirampas pada masa rezim komunis berkuasa. Slovakia juga meratifikasi konvensi Genewa mengenai perlindungan terhadap pengungsi untuk mencari tempat yang aman dan dilindungi oleh hukum internasional. Sejumlah kasus perlakuan yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh aparat kepolisian dilaporkan dan ditindak dengan sanksi yang tegas oleh pemerintah.

Berbagai kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Slovakia untuk membangun institusi-institusi yang dapat menjamin pelaksanaan demokrasi ditujukan untuk memenuhi kriteria yang diajukan oleh Uni Eropa di bidang politik. Sejumlah reformasi di bidang politik dan lembaga-lembaga pemerintah berhasil mendorong pertumbuhan demokrasi di Slovakia. System multipartai merupakan ciri khas yang sering ditemui dalam system politik demokrasi dimana pemilihan berlangsung secara bebas dan persaingan masing-masing partai cenderung seimbang dan proporsional.

⁶⁹ *ibid*

Akhirnya, perubahan yang dilakukan pemerintah Slovakia di bidang politik dengan mendorong terbentuknya lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang lebih demokratis yang sejalan dengan agenda yang diajukan oleh Uni Eropa sehingga Slovakia berhasil diterima menjadi anggota Uni Eropa.

II. Proses Liberalisasi Ekonomi

Dewan UE mewajibkan calon anggotanya memenuhi kriteria ekonomi yang sesuai dengan ketentuan dalam Deklarasi Kopenhagen tahun 1993 yaitu berfungsinya ekonomi pasar bebas, dan kemampuan untuk bersaing dalam persaingan pasar tunggal Eropa. Kriteria ekonomi tersebut mencakup berbagai aspek yang merupakan indikator transformasi ekonomi, antara lain liberalisasi harga dan sistem perdagangan, stabilitas ekonomi, perubahan structural, dan reformasi di bidang financial.

Terdapat dua faktor penting yang terdapat dalam liberalisasi ekonomi yaitu, Pertama : meminimalisir intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Artinya, peran negara di bidang ekonomi dibatasi dan membiarkan mekanisme pasar berjalan dengan sendirinya, termasuk dalam hal alokasi sumber daya. Negara hanya berkewajiban dalam perlindungan hak milik, mendorong proses pasar bebas, pembangunan infrastruktur, dan penerapan pajak yang rendah.⁷⁰ Implementasi dari liberalisasi ekonomi seringkali memerlukan serangkaian kebijakan penyesuaian struktur yang meliputi restrukturisasi

⁷⁰ "Protecting Economic Reform by Seeking Membership in Liberal International Organizations", <http://www.nbs.sk/biatec/trajan.pdf>

sektor industri, pengaturan ulang pembelanjaan sektor publik, liberalisasi sektor finansial, privatisasi dan deregulasi.

Faktor penting kedua dalam liberalisasi yaitu, terbukanya perekonomian domestik bagi transaksi ekonomi internasional. Dengan kata lain, pasar domestik harus terbuka bagi lalu lintas perdagangan, modal, investasi, dan teknologi dari luar. Dua aspek ini merupakan instrument kebijakan utama yang dapat mengubah anggaran belanja pemerintah, perdagangan luar negeri, regulasi perusahaan swasta, dan kebijakan-kebijakan perusahaan nasional. Keseluruhan proses liberalisasi meliputi penurunan intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi, pengurangan control pemerintah dalam proses dan kegiatan ekonomi seperti penentuan harga, mendorong pertumbuhan sektor swasta, dan liberalisasi perdagangan luar negeri.

Di bawah pemerintahan perdana menteri Meciari, pemerintahan koalisi justru menghambat proses liberalisasi ekonomi yang ditandai dengan tingginya intervensi pemerintah dan proteksi negara di sektor ekonomi. Beberapa peraturan baru merupakan konspirasi bagi kepentingan penguasa dan mengakibatkan distorsi pasar.

Meciari secara insentif melakukan pemusatan kekuatan ekonomi dan politik di bawah kekuasaan negara, dengan cara mengeluarkan undang-undang yang membatasi

kepemilikan masyarakat sementara negara mendapatkan kemudahan, selain itu privatisasi hak milik tanah justru dimonopoli oleh orang-orang dekat Meciar.⁷¹

Dengan kondisi ekonomi Slovakia yang belum stabil serta kurangnya penerapan sistem ekonomi pasar terbuka merupakan salah satu factor penundaan keanggotaan Slovakia ke dalam UE. Pemerintahan Slovakia harus dapat mereformasi system ekonominya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh UE apabila ingin menjadi salah satu anggotanya. Salah satu perubahan sistem ekonomi tersebut adalah dengan melakukan liberalisasi ekonomi, beberapa bidang ekonomi yang diliberalisasi oleh pemerintah Slovakia adalah sebagai berikut :

A. Liberalisasi Harga

Pada tahun 1991, 95% dari harga barang-barang kebutuhan pokok sudah diliberalisasi. Memasuki tahun 1995 masih terdapat sekitar 10% harga barang yang diatur oleh negara, seperti bidang energi, gas, listrik, pelayanan public dan sebagainya. Tahun 1996, hukum mengenai peraturan harga telah diadopsi dan memeberikan kekuasaan abgi pemerintah untuk menjustifikasi perubahan harga yang besar. Undang-undang ini hanya digunakan untuk mengontrol harga produk pertanian yang jumlahnya terbatas, dan juga digunakan untuk menjaga kondisi normal pasar atau fluktuasi musiman.⁷²

⁷¹ "Trade Policy Review Body ; Slovak Republic", http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp179_e.htm

⁷² Ibid

Pada tahun 2001, hampir semua pengontrolan harga tidak lagi berada di bawah kekuasaan negara, harga bahan-bahan makanan, energi, listrik, gas, dan yang menyangkut kepentingan publik masih dikuasai negara. Hal ini bisa dipahami karena sebagian anggota UE juga melakukan hal yang sama. Peningkatan keuntungan dalam stabilisasi makro, termasuk konsolidasi fiskal, sejak akhir 1990-an. Walaupun pengangguran tetap tinggi, perekonomian mulai pulih, dan adanya prospek yang menjanjikan. UE mencatat bahwa meskipun kesulitan ekonomi terakhir, Pemerintah Slovakia belum menempuh langkah-langkah proteksionis perdagangan obat, dan memang hal itu telah mengambil langkah lebih lanjut untuk liberalisasi rezim perdagangan.

Reformasi struktural yang telah direvitalisasi dan kerangka kelembagaan legislatif yang sedang diperkuat, termasuk perubahan komersial yang penting. Perubahan yang banyak dari hasil positif terkait dengan rencana akses Slovakia ke UE, dan mengacu pada prestasi substansial dalam negosiasi ini sejauh ini. UE juga mendukung program privatisasi lebih transparan dan aktif mencakup sektor-sektor kunci, seperti di bidang telekomunikasi dan perbankan.⁷³

B. Liberalisasi Perdagangan

Sejak menjadi negara merdeka, Slovakia mulai membangun institusi-institusi pendukung bagi berlakunya ekonomi pasar dan untuk melanjutkan reformasi ekonomi. Pada umumnya Slovakia memiliki rezim perdagangan yang bebas dan transparan, melalui

⁷³ Ibid

penerapan tarif 10% sementara bagi impor bahan-bahan kebutuhan masyarakat. Liberalisasi perdagangan dilakukan dengan mengupayakan agar lalu lintas barang dan jasa dari luar menjadi bebas memasuki pasar domestik dengan cara menurunkan tarif bea masuk dan mengurangi hambatan-hambatan non tarif dalam perdagangan dalam negeri. Tarif bea masuk yang ditetapkan bagi mitra dagang khusus adalah tarif rata-rata. Keterbukaan ini akan membantu revitalisasi ekonomi yang akan dijalankan oleh pemerintah Slovakia.

Pada tahun 1993 bea masuk impor masih sangat tinggi yaitu sebesar 10% karena merupakan kebijakan sementara pemerintah untuk mendukung keseimbangan kondisi pembayaran. Di bawah tekanan UE dan WTO akhirnya pemerintah Slovakia kemudian menurunkan tarif bea masuk hingga sebesar 7,5% pada tahun 1996. Tarif yang ditetapkan bagi mitra dagang khusus adalah sebesar 6.1% pada tahun 2001, mengalami penurunan dibandingkan tahun 1996 sebesar 8%. Komoditi perdagangan Slovakia dengan mitra dagang khusus di enam perjanjian dagang regional mencapai 83% ekspor dan 70% impor. Ke enam perjanjian regional tersebut antara lain adalah *Czech-Slovakia*, *The European Union Association Agreement*, *The Central European Free Trade Agreement* (CEFTA, terdiri dari Slovakia, Ceko, Hongaria, dan Polandia), dan perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara lain yang terikat dalam *The European Free Trade Agreement* (EFTA).⁷⁴

⁷⁴ "The Slovak Republic : Key Economic Indicator",
http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/economics/trade_reports/1993/SlovakRepublic.html

Pemerintahan Dzurinda juga berupaya mengurangi hambatan non tarif. Kuota impor hanya diberlakukan bagi sebagian produk seperti sepatu dan gula untuk importer dari China dan Ceko sampai akhir tahun 2002. Tarif kuota impor yang tinggi diberlakukan bagi 24 jenis produk-produk pertanian dan tembakau yang bisa mencapai 70% sampai dengan 125%. Sebagian besar kuota impor mengalami penurunan sebesar 45% pada tahun 2000. Kuota impor untuk bir dan minuman non alkohol dikurangi secara bertahap sampai dengan tahun 2001.⁷⁵

Peraturan liberalisasi perdagangan pemerintah Slovakia dilengkapi dengan keterbukaan bagi investasi asing. Jika telah melengkapi prosedur yang diwajibkan, perusahaan asing atau perseorangan bisa mengoperasikan bisnisnya di Slovakia dan memperoleh perlakuan yang sama dengan perusahaan dalam negeri, dengan hanya sedikit pengecualian. Investor asing juga dapat membagi keuntungan setelah pajak dengan negara asal mereka.⁷⁶

C. Privatisasi

Pemerintah Slovakia menyadari bahwa privatisasi memegang peranan penting dalam transformasi ekonomi dan meletakkan landasan bagi kelanjutan dan akselerasi privatisasi di masa depan Slovakia. Program mempercepat proses privatisasi di Slovakia dimulai tahun bersamaan dengan pemisahan dari CSFR (Czech and Slovak Federal Republic).

⁷⁵ "Trade Policies and Trading Partners", http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm

⁷⁶ *Ibid*

Setelah mencapai kemerdekaan persiapan untuk proses privatisasi tahap kedua mulai dilakukan dan ketika pemerintahan terganti, agenda tersebut dirubah dengan program penjualan langsung dimulai tahun 1995.⁷⁷

Di bawah rezim Meciar, proses privatisasi ditandai sebagai proses yang tidak transparan dan restrukturisasi perusahaan yang diprivatisasi terhambat karena disebabkan oleh rendahnya investasi modal di dalam negeri. Perbankan tidak dapat memberikan pinjaman yang dibutuhkan karena sebagian besar nasabah tidak mampu membayar utangnya kembali. Privatisasi yang tidak transparan hanya melibatkan kroni-kroni Meciar dalam proses tersebut. Meciar bahkan mencoba menyimpan sejumlah saham dari perusahaan setelah pemerintah memutuskan menggunakan metode penjualan langsung untuk proses privatisasi.

Sejumlah perusahaan besar dan perusahaan kecil diprivatisasi mulai tahun 1991, kira-kira sebanyak 9500 perusahaan kecil, termasuk 6500 toko retail telah diprivatisasi. Privatisasi perumahan bagi penduduk kota juga dilakukan pada periode yang sama. Privatisasi dalam jumlah yang besar harus tertunda beberapa kali akibat perubahan konseptual dan politik dalam pemerintahan Slovakia.⁷⁸

Privatisasi dalam skala besar berakhir pada September 1993 yakni sebanyak 703 perusahaan senilai 5,3 miliar dollar berhasil diprivatisasi. Meciar menolak privatisasi

⁷⁷ Ibid

⁷⁸ Ibid

perusahaan penghasil energy dan sejumlah perusahaan lain yang sudah berada di daftar nama perusahaan yang akan diprivatisasi.

Sebelum tahun 1989, lebih dari 80% area pertanian dimiliki secara kolektif atau merupakan milik negara. Sejak merdeka, undang-undang kepemilikan mulai diterapkan sehingga lahan pertanian dapat dimiliki secara individual atau oleh swasta. Walaupun secara keseluruhan implementasi dari undang-undang tersebut tidak mengubah struktur kepemilikan. Hanya sebagian kecil tanah milik negara yang diprivatisasi. Sektor pertanian menyerap sekitar 9,3% dari populasi. Pada masa awal proses transisi dan penerapan liberalisasi harga, produktivitas sektor pertanian menurun drastis. Akan tetapi sektor ini cepat bangkit kembali dan mengalami peningkatan pertumbuhan pada tahun 1993.⁷⁹

Dzurinda yang berkuasa sejak tahun 1998, mengagendakan Slovakia untuk secepatnya dapat bergabung menjadi anggota UE. Oleh sebab itu, pemerintahan mengalami banyak perubahan. Perubahan administratif yang dilakukan Dzurinda adalah pencabutan undang-undang mengenai privatisasi sektor strategis yang diterapkan pemerintah sebelumnya. Hukum baru yang diberlakukan Dzurinda memperbolehkan privatisasi lokal bagi sebagian besar bisnis-bisnis dan mengizinkan kepemilikan saham sebesar 49% bagi investor asing dan penguasaan manajemen perusahaan gas alam, produsen tenaga listrik, perusahaan distributor listrik dan penyaluran minyak. Semua jenis privatisasi ini kecuali

⁷⁹ Ibid

produsen listrik telah selesai dilaksanakan. Pemerintah masih mempertahankan kepemilikan jalur kereta api, penyediaan air, dan perusahaan perhutanan.

D. Stabilitas Ekonomi Slovakia

Pemerintah berupaya mendorong stabilitas ekonomi dengan menerapkan kebijakan fiskal dan moneter yang ketat. Kebijakan ini cukup berhasil mengurangi inflasi selama periode masa transisi. Hanya pada tahun 1991, sebagai akibat dari liberalisasi harga dan tahun 1993 inflasi mencapai level yang tinggi. Namun sejak saat itu, inflasi mulai menurun secara bertahap hingga mencapai rata-rata 5,8% pada tahun 1996, yang merupakan tingkat terendah dibandingkan negara-negara lain yang mengalami masa transisi. Akan tetapi karena tingginya permintaan dalam negeri dan beberapa kebijakan penyesuaian pengaturan harga, inflasi kembali meningkat pada tahun 1997, sekalipun pemerintah berharap bahwa inflasi akan mengalami penurunan sepanjang tahun 1997.

Pengangguran meningkat tajam pada masa awal transisi, angka pengangguran mencapai 15,2% pada Januari 1994 dan Januari 1995, namun pada tahun 1996 mengalami penurunan sebesar 12,8%. Hal ini disebabkan oleh penyebaran yang tidak merata, dan hanya sedikit pertumbuhan ekonomi yang menyerap tenaga kerja selain itu juga disebabkan terjadinya peningkatan jumlah tenaga kerja.

Memasuki tahun pertama pasca kemerdekaan, defisit anggaran pemerintah secara umum meningkat menjadi 7,6% dari GDP, sebagai konsekuensi berhentinya bantuan fiskal

dari Republik Ceko dan hambatan-hambatan dalam pembuatan peraturan pajak yang baru. Pembiayaan sektor publik mengalami peningkatan tahun 1994 dan mencapai titik keseimbangan tahun 1995 yang salah satunya disebabkan penerimaan pajak yang lebih besar dari perkiraan pemerintah.⁸⁰

GDP meningkat 6,5% pada tahun 1995 namun menurun menjadi 1,3% pada tahun 1999. Kebijakan fiscal mengalami perluasan tahun 1996, yang mencatat deficit negara sebesar 1,3% dari GDP. Dalam anggaran negara tahun 1997, pembelanjaan negara mengalami peningkatan disbanding tahun 1996. Tingkat pertumbuhan yang telah dicapai pada periode Meciar juga diikuti dengan tingginya pembelanjaan negara dan kegiatan ekonomi yang tidak produktif.⁸¹

Sekalipun beberapa perubahan telah dilakukan Slovakia pada masa pemerintahan Meciar, namun Dewan UE menganggap bahwa pasca kemerdekaan sampai dengan tahun 1997 Slovakia masih belum memiliki mekanisme untuk menjalankan ekonomi pasar sehingga UE menolak keanggotaan Slovakia. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya intervensi yang dilakukan oleh pemerintahan Meciar di bidang ekonomi, misalnya privatisasi yang tidak transparan dan dalam mekanisme penetapan harga minyak, energi, dan bahan-bahan pokok sebagian besar masih dikuasai negara.

⁸⁰ "Slovakia : Is The Miracle Economic Over? ", <http://www.ired.com/news/mkt/slovak-miracle.htm>

⁸¹ Ibid

Pada saat defisit neraca pembayaran meningkat, Slovakia menawarkan paket reformasi ekonomi pada tahun 1999 sebagai bagian dari kebijakan untuk menciptakan stabilitas ekonomi, namun kebijakan ini mendapat kritikan dari UE dan dianggap belum cukup untuk memenuhi kriteria yang diajukan.⁸²

UE melihat perubahan besar yang dilakukan Slovakia di bawah pemerintahan Dzurinda, tidak hanya di bidang politik tapi juga di bidang ekonomi. Komitmen pemerintah untuk menerapkan ekonomi pasar bebas mengalami kemajuan dan pemerintah berhasil mencapai stabilitas ekonomi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Sekalipun demikian, posisi fiskal masih cenderung lemah, inflasi dan tingkat pengangguran masih tinggi. Pemerintahan Dzurinda menghadapi masalah struktural peninggalan Meciar seperti perusahaan-perusahaan yang tidak efisien, perbankan yang bankrupt, hutang perusahaan yang besar, dan penurunan dukungan pembayaran pajak. Selain itu pemerintah juga menghadapi ketidakpuasan publik akibat implementasi kebijakan fiskal yang ketat, peningkatan pengangguran yang mencapai 20% pada tahun 1999, peningkatan harga barang-barang pokok, dan merosotnya standar hidup masyarakat.⁸³

Setelah periode stabilisasi ekonomi tahun 1999-2000, perdagangan luar negeri sedikit menurun sehubungan dengan defisit sebesar 2,2 juta dollar, hutang luar negeri

⁸² "Economy - Overview : Slovakia", <http://www.eubusiness.com/europe/slovakia/econ>

⁸³ "The Economy of Slovakia", <http://globaledege.msu.edu/countries/slovakia/economy/>

sebesar 11 milyar dollar pada tahun 2002, mencapai 55% dari GDP. Pertumbuhan GDP mengalami penurunan pada tahun 1999. Namun tahun 2001 kembali meningkat menjadi 3,3% dari GDP. Pemerintah secara bertahap berhasil memulihkan stabilitas ekonomi mulai akhir tahun 1999. Defisit fiscal berkurang hingga 6% tahun 1998, sekalipun masih relatif lebih tinggi dari tahun 1994 yang hanya sebesar 4% dari GDP. Investasi asing sekalipun belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, namun beberapa bagian dari mereka mulai merubah pandangan terhadap Slovakia. Perbaikan kondisi perekonomian ini membawa dampak positif bagi Slovakia dimana mereka diundang oleh UE untuk melakukan negosiasi bergabung menjadi anggota UE pada akhir tahun 2000.

Tingkat investasi asing di Slovakia masih cenderung rendah sekalipun pemerintahan Dzurinda telah membuka peluang bagi masuknya investor asing dan menawarkan kebijakan insentif yang kompetitif. Jerman merupakan mitra dagang terbesar yang memenuhi kebutuhan impor Slovakia sebesar 25% dan ekspor sebesar 27%. Mitra dagang utama ekspor dan impor yang lain adalah Republik Ceko, Austria, Russia, dan Italia. Tujuan ekspor Slovakia yang utama adalah ke negara-negara anggota OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) dan negara-negara anggota UE yang mencapai 50% lebih dari nilai total perdagangannya. Pemerintah Slovakia menerima perlakuan istimewa dan pembebasan bea masuk untuk produk-produknya di beberapa negara.⁸⁴

⁸⁴ Ibid

Rata-rata upah minimum di Slovakia juga mengalami peningkatan, tingkat suku bunga menurun, dan investasi asing yang mencapai 732 juta dollar. Sebagian besar harga-harga diliberalisasi dan perdagangan luar negeri tumbuh dengan pesat. Untuk itu diperlukan restrukturisasi sektor sosial yang merupakan bagian penting dari keseluruhan sistem tersebut. Termasuk asuransi pekerja, jaminan keselamatan, asuransi kesehatan, dan subsidi perumahan. Oleh Bank Dunia, Slovakia dimasukkan ke dalam kategori negara yang mempunyai hutang luar negeri yang rendah. Hutang luar negeri pada akhir tahun 1994 hanya sebesar 4,1 miliar dollar.⁸⁵

Perekonomian Slovakia memiliki sejumlah asset penting yang sudah siap menghadapi persaingan dan kekuatan pasar di pasar tunggal Eropa. Perekonomian sudah mencapai stabilisasi dan pertumbuhan yang cepat, upah buruh yang relative rendah dan penduduk yang terdidik. Slovakia juga sudah siap mengubah orientasi pasarnya ke Eropa Barat. Tingkat pertumbuhan dan arus perdagangan yang tinggi dengan negara-negara UE selama tahun-tahun terakhir tidak hanya menunjukkan bahwa Slovakia sudah cukup kompetitif untuk mengekspor produknya ke UE, namun juga membuktikan bahwa Slovakia mampu memproduksi barang-barang yang sesuai dengan standar dan peraturan yang ditetapkan oleh pasar tunggal Eropa.

Pada mulanya, Slovakia menemui kesulitan mengadopsi hukum-hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan ekonomi pasar. Akan tetapi sekarang bisa ditemukan

⁸⁵ "Slovak Republic : The Development Challenge", www.kri.sk/files/294.pdf

indikator kemajuan yang telah dicapai oleh Slovakia dalam meningkatkan kemampuannya untuk memasuki wilayah yang penuh dengan tekanan persaingan di pasar tunggal Eropa. Hal tersebut memerlukan suatu kerangka ekonomi makro yang stabil dimana pelaku-pelaku ekonomi bisa membuat keputusan dalam situasi yang dapat diprediksi. Harus terdapat sumber daya manusia yang cukup dan modal infrastruktur sebagai pendukung stabilitas ekonomi, sehingga perusahaan-perusahaan mempunyai kemampuan untuk menghadapi persaingan di pasar tunggal. Kemampuan untuk beradaptasi semakin bertambah, semakin banyak perusahaan yang menerima investasi modal, semakin baik kinerja mereka, dan semakin sukses dalam berinovasi.

Keberhasilan Slovakia dalam melakukan liberalisasi ekonomi dan melakukan kebijakan-kebijakan ekonomi pasar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi Dewan UE untuk menerima Slovakia menjadi anggota UE. Sejumlah ketentuan dan poin penting dari criteria ekonomi yang disyaratkan oleh UE telah dipenuhi oleh Slovakia, seperti tingkat pertumbuhan GDP yang stabil, inflasi yang rendah, pertumbuhan ekonomi dan sektor industri yang signifikan, kondisi fiskal yang kuat, dan rendahnya defisit neraca pembayaran. Sekalipun masih ditemukan beberapa kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi pasar, namun secara keseluruhan Dewan UE optimis bahwa Slovakia mampu mencapai perkembangan ekonomi yang setara dengan negara-negara anggota UE lainnya, dan melanjutkan reformasi sistem ekonominya yang terpusat menjadi sistem ekonomi pasar.

Setelah berbagai perubahan telah dilakukan Slovakia agar dapat diterima menjadi anggota Uni Eropa, reformasi yang dilakukan sejak tahun 1998 tersebut membuahkan hasil yang memuaskan. Pada tahun 2002, Slovakia bersama negara-negara kandidat lainnya menandatangani perjanjian perluasan Uni Eropa. Bersama dengan sembilan negara lainnya, Slovakia telah resmi menjadi anggota Uni Eropa.

Dan peresmian penerimaan keanggotaan Slovakia dalam Uni Eropa dilakukan pada tanggal 1 Mei 2004. Seperti yang tertuang dalam Jurnal Resmi Uni Eropa yang dikeluarkan pada tanggal 9 April 2003 di Kopenhagen, Denmark. Adapun Resolusi Parlemen Legislatif Eropa memiliki dua point utama yaitu :

1. Memberikan persetujuan kepada aplikasi Republik Slovakia untuk menjadi anggota Uni Eropa.
2. Presiden Uni Eropa memerintahkan untuk meneruskan posisinya kepada Dewan, Komisi, dan pemerintah dan parlemen dari negara-negara anggota yang lain dan Republik Slovakia.⁸⁶

⁸⁶ *EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION on the application by the Slovak Republic to become a member of the European Union, Official Journal of the European Union, March 9th 2003*